

TESIS

PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT ASET, DAN PENILAIAN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP LINGKUP SETJEN KLHK.

Disusun Oleh :

NAMA	: TONY SUPRAPTO
NPM	: 1863002131
JURUSAN	: ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	: MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat
guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik
(M.Tr.A.P.)**



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

2020

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	:	Tony Suprapto
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1863002131
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Manajemen Keuangan Negara
Judul Tugas Akhir/Tesis	:	Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Lingkup Setjen KLHK

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 2020
Pembimbing Tesis



(Dr. R. Luki Karunia, MA)

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : TONY SUPRAPTO
NOMOR POKOK : 1863002131
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TUGAS AKHIR/TESIS : PENGARUH INVENTARISASI ASET,
LEGAL AUDIT ASET, DAN PENILAIAN
ASET TERHADAP OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ASET TETAP LINGKUP
SETJEN KLHK

Telah mempertahankan tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Terapan Adminstrasi Pembangunan Negara, Politeknik Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juli 2020
Pukul : 14.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si

Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Anggota : Dr. Hamka, MA

Pembimbing Tugas
Akhir/Tesis : Dr. R. Luki Karunia, MA



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tony Suprapto
NPM : 1863002131
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Lingkup Setjen KLHK merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis,



Tony Suprapto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga Tesis dengan judul “Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset dan Legal Audit Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Lingkup Setjen KLHK” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr. AP) pada Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. R. Luki Karunia, MA atas bimbingan ilmu, tenaga, pikiran serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan serta kesediaannya mengikut sertakan penulis pada Seminar Internasional (ICoGPASS 2019).
2. Dr. Hamka, MA, Dr. Asropi, M.Si dan Dr. Ridwan Rajab, M.Si, yg telah memberikan masukan dan saran saat Seminar Proposal, Seminar Hasil Tesis dan Ujian Tesis.
3. Direktur, Dosen-Dosen Program Magister Administrasi Pembangunan Negara khususnya Dosen Manajemen Keuangan Negara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dalam mendalami Ilmu Administrasi, serta semua civitas akademis Politeknik STIA LAN Jakarta atas dukungan dan bantuannya.

4. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Terapan Manajemen Keuangan Negara Angkatan Tahun 2018 yang selalu kompak sampai akhir semester, walaupun semester akhirnya berbeda.
5. Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan, rekan kerja pada Satker Pustek KL serta semua rekan-rekan kerja lingkup Setjen KLHK atas dukungan dan bantuannya.
6. Orang tua saya Bapak Sardini dan Ibu Sumilah, Mertua saya Bapak Sodikin dan Ibu Surtiyah serta kakak dan adik saya semuanya yang telah memberikan dukungan & doanya.
7. Istri saya Widyastuti, A.Md, atas segala motivasi, perhatian, doa serta kesabaran dalam mendukung terselesaikannya pendidikan magister ini.
8. Kepada semua pihak yg telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yg ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan pengembangan lanjut agar lebih bermanfaat. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi.

Jakarta, Juli 2020

Tony Suprapto

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRAK

TONY SUPRAPTO, 1863002131

PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT ASET, DAN
PENILAIAN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET
TETAP LINGKUP SETJEN KLHK

100 halaman, 5 bab, 31 tabel, 8 gambar, 4 lampiran

Daftar Pustaka : 10 buku dan peraturan, 12 jurnal dan artikel

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset tetap lingkup Setjen KLHK. Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa koefisien variabel Inventarisasi Aset mempunyai arah negatif sedangkan Legal Audit dan Penilaian Aset mempunyai arah positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap yang menunjukkan bahwa jika pelaksanaan Legal Audit Aset dan Penilaian Aset meningkat sebesar 1 persen, maka secara rata-rata optimalisasi pengelolaan aset akan naik sebesar 3,12 persen dengan anggapan bahwa variabel lain tetap. Hasil regresi uji F pada didapat bahwa nilai F-hitung 83,586 dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil analisis bahwa dengan menggunakan model regresi diketahui bahwa nilai R-Squared (R²) sebesar 0,504, hasil ini menunjukkan bahwa 50,4% variabel optimalisasi pengelolaan aset tetap dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan 40,6% disebabkan oleh faktor lain.

Kata kunci: Optimalisasi Pengelolaan Aset, Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of obtaining empirical evidence related to the effect of Asset Inventory, Asset Legal Audit, and Asset Valuation on the Optimization of Asset Management in the scope of the KLHK Secretariat General. From the t test results it can be seen that the coefficient of the variable Asset Inventory has a negative direction while the Legal Audit and Asset Valuation has a positive and significant direction towards optimizing the management of fixed assets which means that if the implementation of the Asset Legal Audit and Asset Valuation increases by 1 percent, then on average the average asset optimization will increase by 3.12 percent assuming that other variables remain. The results of the F test regression found that the F-value was 83.586 and it could be concluded that all the independent variables together influenced the dependent variable. From the results of the analysis that using the regression model it is known that the R-Squared (R²) value of 0.504, this result shows that 50.4% of the variable optimization of fixed asset management is influenced by the independent variable, while 40.6% is caused by other factors.

Keywords: Optimization of Asset Management, Asset Inventory, Legal Asset Audit, Asset Valuation.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	
Lembar Persetujuan	
Lembar Pengesahan	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Bab I Permasalahan Penelitian	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
Bab II Kerangka Teori	12
A. Tinjauan Teori	12
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya	31
D. Kerangka Berpikir	36
E. Hipotesis Penelitian	38
Bab III Metodologi Penelitian	39
A. Metode Penelitian	39
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	48
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Instrumen Penelitian	52
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	65
Bab IV Hasil Penelitian	68
A. Deskripsi Data	68

B. Analisis Hipotesis Penelitian	76
C. Pembahasan Hasil Penelitian dan Keterbatasan Penelitian	90
Bab V Simpulan dan Saran	98
A. Simpulan	98
B. Saran	103
Daftar Pustaka	106
Daftar Lampiran	
Instrumen Penelitian	108
Tabel Penentuan Jumlah Sampel	111
Tabel Nilai-Nilai Dalam Distribusi t	112
Tabel Nilai-Nilai r <i>Product Moment</i>	113

POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Nilai Aset Tetap Lingkup KLHK dan Nilai Temuan BPK Atas Pengelolaan Aset Tetap	9
2.	Alur Perkembangan Manajemen Aset	20
3.	Penelitian Terdahulu	30
4.	Operasional Variabel Inventarisasi Aset	44
5.	Operasional Variabel Legal Audit Aset	45
6.	Operasional Variabel Penilaian Aset	46
7.	Operaional Variabel Optimalisasi Pengelolaan Aset	47
8.	Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Inventarisasi Aset	57
9.	Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Legal Audit Aset	58
10.	Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penilaian Aset	59
11.	Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Optimalisasi Pengelolaan Aset	60
12.	Hasil Uji Normalitas	61
13.	Hasil Uji Heterokedastisitas	63
14.	Hasil Uji Multikolinearitas	64
15.	Penggunaan Statistik Parametrik dan Non Parametrik Untuk Menguji Hipotesis	65
16.	Hasil Deskriptif Variabel Inventarisasi Aset	76
17.	Capaian Persentase Variabel Inventarisasi Aset	77
18.	Hasil Uji Parsial (t) Variabel Inventarisasi Aset	78
19.	Hasil Perhitungan Nilai Kontribusi Variabel Inventarisasi Aset	79
20.	Hasil Deskriptif Variabel Legal Audit Aset	80

21.	Capaian Presentasi Variabel Legal Audit Aset	81
22.	Hasil Uji Parsial (t) Variabel Legal Audit Aset	81
23.	Hasil Perhitungan Nilai Kontribusi Variabel Legal Audit Aset	83
24.	Hasil Deskriptif Variabel Penilaian Aset	83
25.	Capaian Hasil Variabel Penilaian Aset	84
26.	Hasil Uji Parsial (t) Variabel Penilaian Aset	85
27.	Hasil Perhitungan Nilai Kontribusi Variabel Penilaian Aset	86
28.	Hasil Deskriptif Variabel Optimalisasi Pengelolaan Aset	86
29.	Capaian Hasil Variabel Optimalisasi Pengelolaan Aset	87
30.	Hasil Uji Simultan (F) Variabel Bebas terhadap Variabel Dependen	88
31.	Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat	89

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Perjalanan Opini BPK KLHK	8
2.	Alur Manajemen Aset	21
3.	Model Penelitian (Variabel dan Indikatornya)	37
4.	Metode Penelitian	41
5.	Garis Kontinu Variabel Inventarisasi Aset	77
6.	Garis Kontinu Variabel Legal Audit Aset	81
7.	Garis Kontinu Variabel Penilaian Aset	84
8.	Garis Kontinu Variabel Optimalisasi Pengelolaan Aset	88

**POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Barang Milik Negara (BMN) masih dianggap belum begitu penting dan pada umumnya Kementerian/Lembaga belum menyadari bahwa BMN merupakan bagian dari aset negara yang perlu perencanaan, pengelolaan dan perawatan yang baik. Pengelolaan BMN yang baik dapat mencerminkan kemampuan suatu negara dalam hal perencanaan dan memberikan informasi bagaimana suatu Kementerian/Lembaga mampu mengeksekusi suatu pembangunan dengan baik.

Pada masa orde baru pembukuan terhadap BMN masih sederhana dan pemerintah belum mempedulikan kondisi BMN yang dimiliki, begitupun sampai saat ini pengelolaan BMN masih belum optimal. Pemerintah hanya fokus pada pembangunan, kurang memperhatikan perawatan BMN. Pada tahun 2004, pembukuan BMN mulai dilaksanakan, walaupun opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada saat itu masih *disclaimer*. Namun, hal ini menjadi sebuah langkah baik untuk memperbaiki sistem pengelolaan BMN di Indonesia.

Selain mengenai perawatan, optimalisasi pemanfaatan BMN juga perlu mendapat perhatian khusus dan prinsip optimalisasi pemanfaatan BMN harus diterapkan. BMN adalah aset negara yang digunakan untuk pemerintah, akan

tetapi ketika aset tersebut tidak digunakan oleh pemerintah maka penggunaannya bisa dialihkan untuk hal lain sehingga aset terus bekerja dan value bertambah. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah praktek *open space*, atau penggunaan aset negara bagi kalangan luas.

Pengelolaan BMN saat ini menjadi salah satu program kerja utama Pemerintah, hal ini didukung dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyajian pada neraca, BMN terdiri dari aset lancar (persediaan), aset tetap (tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jembatan, konstruksi dalam penggerjaan) dan aset lainnya (aset tidak berwujud). Pengelolaan BMN yang lebih profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditandai dengan pengelolaan BMN yang tidak hanya berfokus pada hal administratif, pengelolaan BMN sudah memperhatikan pada upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas serta menciptakan nilai tambah.

Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meresmikan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Aplikasi SIMAN membantu proses pengelolaan BMN menjadi lebih cepat, efisien dan terdokumentasi secara digital. SIMAN mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan,

penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh pengelola dan pengguna.

Selain itu, SIMAN mengintegrasikan proses pengelolaan BMN ke dalam satu sistem. SIMAN juga memberikan data BMN untuk kebutuhan manajemen aset hingga pengelolaan BMN dapat dipantau secara *online* oleh pengguna maupun pengelola.

Kemampuan pengelolaan BMN dengan baik dapat mencerminkan bahwa suatu negara mampu membuat perencanaan pembangunan dengan baik. Karena kita ketahui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan BMN selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Hingga 2017, rata-rata PNBP dari hasil pemanfaatan BMN mencapai Rp 2,17 triliun atau 0,79 persen dari rata-rata total PNBP selama tiga tahun terakhir dan tercatat total PNBP mencapai Rp 276,27 triliun.

Pemerintah saat ini berkomitmen untuk mengelola BMN secara profesional dan optimal yang dibuktikan dengan kinerja pengelolaan BMN yang semakin membaik. Salah satunya dengan langkah optimalisasi pemanfaatan BMN kategori menganggur (*idle*) baik berupa bangunan maupun tanah. Tanah atau gedung milik negara, apabila tidak sedang tidak digunakan bisa disewakan untuk menambah pendapatan negara.

Dalam neraca Kementerian/Lembaga, BMN disajikan terdiri dari tiga macam akun yaitu aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Dari ketiga akun tersebut, aset tetap merupakan salah satu akun yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara dan memiliki nilai yang paling besar

dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Aset tetap merupakan akun yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien dapat meningkatkan kemampuan keuangan serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Siregar (2016:40), aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diantaranya adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan.

Aset tetap merupakan bagian dari BMN yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan APBN. Pengelolaan BMN (khususnya tanah dan bangunan) yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara sebagai sumber pembiayaan. Sebaliknya BMN yang tidak dikelola dengan baik, akan merugikan keuangan negara dengan biaya pemeliharaan atas aset yang tidak sebanding dengan keuntungan (manfaat) yang dapat dihasilkan. Sebagai contohnya adalah banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah dalam kondisi menganggur (*idle*) yang terletak pada tempat-tempat strategis dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan sudah pasti mempunyai nilai ekonomis yang tinggi belum dimanfaatkan dengan baik sehingga potensi keuntungan belum dimanfaatkan secara optimal.

Pengelolaan BMN merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi negara. Pentingnya pengelolaan BMN secara tepat dan berdayaguna, dengan prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif diharapkan mampu memberi kekuatan kepada Pemerintah untuk membiayai pembangunan. Selain itu pengelolaan BMN yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat.

Aset tetap sebagai komponen utama dari BMN, harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berdayaguna, sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui pengelolaan BMN yang tepat maka peneliti mencoba membahas Konsep Manajemen Aset menurut Siregar (2004:518) yang dapat dibagi dalam lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset), dimana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya (Siregar, 2004: 518-520).

Sementara itu dapat dilihat juga pada penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2013) mengenai pengaruh Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi NTB. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari nilai signifikan ketiga variabel

Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Dan Penilaian Aset, bahwa yang signifikan hanya variabel Penilaian Aset saja, sedangkan variabel Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset tidak signifikan.

Muhammad Rizky dan Bill Pangayow (2016) meneliti pengaruh manajemen aset terhadap tingkat optimalisasi pengelolaan aset Pemerintah Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset dalam optimalisasi aset tetap secara signifikan dipengaruhi oleh legal audit dan pengawasan dan pengendalian. Sedangkan variabel independen lainnya yaitu inventarisasi dan penilaian aset menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pamfilia Ferdinanda, Westim Ratang dan Arius Kambu (2016), meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset terbukti berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kebupaten Boven Digoel, Legal audit terbukti berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kebupaten Boven Digoel dan Penilaian aset terbukti berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kebupaten Boven Digoel.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa hasil yang didapat tidak selalu sama di setiap lokasi penelitian, sehingga hal ini sangat menarik untuk dibahas. Peneliti ingin mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh

pada optimalisasi pengelolaan aset tetap lingkup Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada penyajian neraca BMN, hal yang paling disoroti adalah nilai pada akun aset tetap. Aset tetap pada umumnya memiliki nilai yang cukup material sehingga sering menjadi obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesesuaian dalam hal pengakuan, pengukuran dan pengungkapan BMN pada Laporan Keuangan merupakan salah satu unsur penting yang digunakan BPK dalam memberikan opini.

Harus dipahami betul oleh Pemerintah bahwa sasaran akhir atau tujuan utama pengelolaan BMN adalah terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan aset. Kenyataan sampai saat ini BMN masih dikelola seadanya, sebatas inventarisasi saja (pencatatan akuntansi). BMN masih dicirikan dengan arus kas negatif, dibanding sebagai BMN yang produktif dan memberikan pendapatan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 mengelola aset tetap sebesar Rp. 5.585.962.139.310,00 (Lima Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), nilai ini cukup besar dan harus dikelola dengan baik.

Dalam mendukung pengelolaan aset ke arah yang lebih baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya melakukan inventarisasi dan labelisasi nomor inventaris barang serta pengusulan penghapusan atas aset tetap yang rusak

berat, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Instansi terkait untuk menginventarisasi dan melakukan koreksi pencatatan Aset Tetap yang belum tercatat dalam laporan BMN serta memerintahkan kepada Kuasa pengguna Barang untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan aset.



Gambar 1. Perjalanan Opini BPK KLHK (Biro Keuangan KLHK, 2018)

Pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, namun ada catatan pada hasil pemeriksaan yaitu pengelolaan aset tetap yang belum tertib sepenuhnya, diantaranya:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- Belanja 526 dan output kegiatannya;
- Temuan berulang terkait pengelolaan aset tetap yang belum optimal;
- Permasalahan Revaluasi Aset.

Pengelolaan BMN pada saat ini menjadi salah satu fokus kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena di setiap tahunnya selalu menjadi temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang sangat material, dan menjadi penghalang pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 1. Nilai Aset Tetap Lingkup KLHK dan Nilai Temuan BPK Atas Pengelolaan Aset Tetap (sumber: LHP BPK RI 2015-2018)

No	Tahun Anggaran	Jumlah Aset Tetap Yang Dikelola (Rp)	Jumlah Aset Tetap Yang Belum Dikelola Dengan Baik/Temuan BPK RI (Rp)
1	2015	5.193.390.970.397,00	406.756.348.274,00
2	2016	5.123.438.138.973,00	127.626.419.727,00
3	2017	5.650.145.201.718,00	699.161.225.311,00
4	2018	5.585.962.139.310,00	96.881.593.191,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada setiap Tahun Anggaran, BPK-RI selalu menyoroti pengelolaan BMN. Permasalahan pengelolaan BMN antara lain:

- a) Inventarisasi aset tetap belum dilaksanakan dengan tertib.
- b) Aset tetap belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan.
- c) Aset tetap dikuasai oleh pihak lain.
- d) Aset tetap bernilai negatif.

e) Metode kerja sama penggunaan aset tanah milik KLHK yang telah dimanfaatkan pihak lain yang belum selesai disepakati.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, diperlukan langkah yang tepat dalam mengoptimalkan pengelolaan aset. KLHK harus membangun sistem pengelolaan aset agar lebih optimal sehingga nantinya permalahan aset tetap yang menjadi temuan BPK RI dapat diminimalisir atau bahkan nihil temuan dan peningkatan optimalisasi pengelolaan aset tetap dapat terwujud. Selain itu optimalisasi pengelolaan aset tetap juga dapat meringankan kerja KLHK dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Karena apabila temuan ini terus terjadi secara berulang pasti akan berdampak pada opini yang diberikan oleh BPK. Untuk selanjutnya diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dengan peningkatan optimalisasi pengelolaan aset tetap dapat mendukung operasional KLHK dan dapat menunjang pembangunan nasional.

Selanjutnya peneliti memilih lokasi di Satker lingkup Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan pada pertimbangan realita pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Lingkup Setjen KLHK.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan pada subbab latar belakang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap milik Kementerian LHK.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Manfaat dalam bidang akademik yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi Kementerian LHK dalam mengelola aset tetap sesuai dengan peraturan dan memberikan referensi dalam bidang ilmu administrasi khususnya manajemen aset.
- 2) Memberikan solusi (*problem solving*) terhadap permasalahan yang terjadi dalam hal manajemen aset.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan data dan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan aset tetap di Satker Lingkup Setjen KLHK belum sepenuhnya bisa dioptimalkan pengelolaannya sehingga diperlukan sebuah sistem manajemen aset sebagai sebuah strategi dalam meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset. Manajemen aset terdiri dari beberapa tahapan yaitu inventarisasi aset, legal audit aset penilaian aset, optimalisasi pengelolaan aset dan pengawasan dan pengendalian. Tahapan-tahapan tersebut menjadi variabel-variabel yang diteliti, dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset, serta variabel dependennya adalah optimalisasi pengelolaan aset. Pada penelitian ini diduga ada pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen yaitu inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset terhadap variabel dependen optimalisasi pengelolaan aset. Dari hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS 25 menunjukkan bahwa:

1. Variabel inventarisasi aset memiliki nilai t hitung -0,044 dan signifikansi 0,965 sehingga nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel

inventarisasi aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa variabel inventarisasi aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset di Satker Lingkup Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tetapi pada perhitungan untuk mengetahui besar masing-masing variabel didapatkan bahwa Inventarisasi Aset memiliki pengaruh sebesar 0,002.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa menurut para responden bahwa Satker Lingkup Setjen KLHK belum menjadikan Inventarisasi Aset (IA) sebagai faktor penentu dalam upaya meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset tetap. Dari hasil jawaban para responden menunjukkan bahwa walaupun kegiatan inventarisasi aset telah dilakukan, tetapi dianggap belum dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset. Pada dasarnya kegiatan inventarisasi aset dilakukan dalam upaya memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terkait aset yang dikuasai oleh Satuan Kerja, tetapi karena ketidaksesuaian terhadap hasil inventarisasi aset dengan kondisi di lapangan mengakibatkan pelaksanaan inventarisasi aset belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan tahapan pengelolaan aset yang selanjutnya.

Tahapan yang selanjutnya berupa keputusan untuk melakukan penghapusan terhadap aset yang telah ditetapkan dalam kondisi rusak

berat. Pada umumnya hasil temuan BPK RI yang terjadi adalah aset pada hasil inventarisasi dalam kondisi baik, tetapi di lapangan didapatkan kondisi yang sebaliknya, sehingga terjadi pemborosan biaya pemeliharaan terhadap aset tersebut.

2. Variabel legal audit aset memiliki nilai t hitung 6,882 dan signifikansi 0,000 sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel legal audit aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Nilai koefisien regresi 0,398 menunjukkan adanya pengaruh yang positif artinya semakin tinggi legal audit aset maka optimalisasi pengelolaan aset juga akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya. Nilai koefisien ini juga mengartikan optimalisasi pemanfaatan aset akan meningkat sebesar 0,398 persen setiap kenaikan satu-satuan dari legal audit aset. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa variabel legal audit berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap di Satker Lingkup Setjen KLHK. Dari hasil perhitungan pengaruh masing-masing variabel didapatkan hasil bahwa legal audit aset mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset sebesar 27,379%, maka hal ini menunjukan bahwa penerapan legal audit yang baik dapat menjamin optimalisasi pengelolaan aset. Dalam hal ini dikarenakan KLHK telah melaksanakan sistem yang terkait dengan penguasaan dan penggunaan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak

penguasaan yang lemah sehingga aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor. Terkait dengan penguasaan oleh KLHK sendiri pada tahun 2017 telah melaksanakan sensus barang milik negara yang dikelola oleh KLHK. Dengan adanya sensus tersebut diharapkan dapat mengetahui aset – aset apa saja yang merupakan milik KLHK. Selain itu KLHK juga tengah berupaya untuk membuat sertifikat sebagai tanda kepemilikan yang sah terhadap aset dalam hal ini tanah. Masih terdapat banyak tanah yang diakui oleh masyarakat, namun KLHK tetap berusaha melakukan pelepasan tanah tersebut secara bertahap, sehingga seluruh aset milik KLHK menjadi jelas.

3. Variabel penilaian aset memiliki nilai t hitung 5,945 dan signifikansi 0,000 sehingga nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel penilaian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Nilai koefisien regresi 0,307 menunjukkan adanya pengaruh yang positif artinya semakin tinggi penilaian aset maka optimalisasi pengelolaan aset juga akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya. Nilai koefisien ini juga mengartikan optimalisasi pengelolaan aset akan meningkat sebesar 0,307 persen setiap kenaikan satu-satuan dari penilaian aset. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa variabel penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset di Satker Lingkup Setjen KLHK

dengan nilai sebesar 23.023%. Hal ini menunjukan bahwa penerapan penilaian aset menjamin optimalisasi pengelolaan aset tetap. Penilaian aset adalah proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Proses kerja ini biasanya dilakukan oleh konsultan penilai yang independen atau ASN dari Kementerian Keuangan. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk menentukan harga bagi aset yang ingin dihapuskan dan dalam hal ini KLHK belum memiliki personil yang bersertifikat.

4. Besarnya nilai hubungan dari variabel inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset terlihat pada nilai korelasi yaitu 0,710. Nilai ini jika dikuadratkan akan menghasilkan nilai R square atau koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi yaitu 0,504 yang dapat dikatakan variabel inventarisasi asset, legal audit asset, dan penilaian asset mampu mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset sebesar 50,4% dengan rincian yaitu Inventarisasi Aset 0,02 %, Legal Audit Aset 27,379% dan Penilaian Aset 23,023% dan sisanya dipegaruhi oleh variabel lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada uji simultan yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel

dependen terlihat pada output table ANOVA. Adanya pengaruh secara bersama-sama antar variabel independen jika nilai F hitung lebih besar dari F table dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nilai F hitung yaitu 83,586 dan signifikansi 0,000 sehingga nilai F hitung lebih besar dari F table dan signifikansi lebih kecil dari 0,05, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh simultan dari variabel inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian asset terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

B. Saran

Adapun saran dari peneliti untuk Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Jenderal KLHK sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan untuk tetap melakukan semua variabel tersebut dalam pengelolaan aset karena mengingat variabel tersebut merupakan tahapan dari Manajemen Aset itu sendiri. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data pada masing-masing variabel, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendaftaran aset tetap yang telah dikuasai sehingga dapat diketahui dari kelompok bidang aset tetap.
 - b. Melakukan pencatatan bukti legal dari penguasaan terhadap aset tetap.
 - c. Menetapkan aset tetap yang memiliki potensi/nila ekonomis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional.

- d. Menyusun metode pengelolaan potensi aset tetap, dengan menetapkan metode/skema pemanfaatan aset tetap yang sesuai.
2. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa variabel-variabel bebas yaitu inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset secara bersama-sama mempengaruhi secara simultan variabel terikat yaitu optimalisasi pengelolaan aset,. Hasil koefisien determinasi yaitu 0,504 yang dapat dikatakan variabel inventarisasi aset, legal audit aset, dan penilaian aset mampu mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset sebesar 50,4% dan sisanya dipegaruhi oleh variabel lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menyarankan untuk mempertimbangkan variabel yang tidak menjadi fokus pada penelitian ini yaitu Pengendalian dan Pengawasan. Pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan oleh koordinator pengawas yang ditempatkan pada masing-masing sekretariat masing-masing eselon 1. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat diterapkan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) yang dapat dibangun oleh masing-masing sekretariat diluar sistem informasi aset yang sudah ada seperti SIMAK BMN dan SIMAN. Pada Sekretariat Jenderal KLHK sudah dimulai dengan membangun Sistem Informasi Monitoring Tanah (SIMONTANA) dan diharapkan diikuti oleh sekretariat eselon 1 lainnya. Melalui SIMA diharapkan transparasi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam

SIMA ini keempat aspek Manajemen Aset (inventarisasi, legal audit, penilaian dan optimalisasi manajemen aset) diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. Setiap penanganan terhadap suatu aset termonitor jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menangani aset tersebut. Hal ini diharapkan akan meminimalkan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam organisasi Pemerintah. SIMA yang ada dalam manajemen aset Pemerintah adalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SIMAK BMN adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi BMN dengan menampilkan bentuk dan format-format standar yang telah dilakukan serta mudah dilaksanakan. Selain itu, untuk menunjang penerapan sistem informasi tersebut perlu juga diikuti dengan pengembangan kompetensi operator pengelola BMN, sehingga tujuan optimalisasi pengelolaan aset dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, 2015, Legal Audit & Legal Opinion, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
- Hery, 2014, Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Ekuitas, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta
- Jamaludin, 2013. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Studi Pada Pemda Provinsi NTB, Tesis, UGM.
- Muhammad Rizky dan Bill Pangayow, 2016. Pengaruh manajemen aset terhadap tingkat optimalisasi pengelolaan aset Pemerintah Kota Jayapura, Tesis, Universitas Cendrawasih.
- Pamfilia Ferdinand, Westim Ratang dan Arius Kambu, 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel) Tesis, Universitas Cendrawasih
- Siregar, Doli. D, 2004, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siregar, Doli. D, 2016, *Aset Daerah: Otonomi dan Pengelolaannya*,, Penerbit Sinergi Manajemen Aset dan YAPPI, Jakarta.
- Sugiaman, A. Gima, 2016, Manajemen Aset Pariwisata, Penerbit Guardaya Intimarta, Bandung.
- Sugiyono, 2017, Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

<https://donyprisma.wordpress.com/2016/02/12/definisi-klasifikasi-perpustakaan/>

[https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-bangsa.](https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2458-manajemen-barang-milik-negara-cermin-peradaban-bangsa)

<https://hatta2stat.wordpress.com/2011/05/21/standar-deviasi/>

<https://hatta2stat.wordpress.com/2011/05/21/standar-eror.>

<https://tekno.kompas.com/read/2015/07/30/113937726/Menkeu.Luncurkan.Sistem.Informasi.Manajemen.Aset.Negara.>

http://www.kjpptrisanti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3Apenilaian-aset&catid=31%3Aumum-jasa-dan-pelayanan&Itemid=57&limitstart=3

<https://www.jogloabang.com/ekbis/kebijakan-akuntansi-aset>

<https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html>

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12719/Kinerja-Pengelolaan-Barang-Milik-Negara-Membaik.html